

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah selalu kita temukan dan mengotori lingkungan di sekitar kita. Maka wajar karena hal itu seringkali sampah menjadi masalah lingkungan yang serius harus ditangani. Sampah bisa membuat suasana nyaman menjadi rusak seketika karena bau sampah yang menyengat. Walaupun sampah jelas-jelas membuat lingkungan tidak nyaman tetapi anehnya kesadaran kita terhadap lingkungan masih jauh dari cukup.

Lingkungan hidup adalah ruang yang mencakup semua makhluk hidup, termasuk manusia dan lingkungan mereka, yang mempengaruhi kehidupan itu sendiri, kelangsungan hidup, kondisi manusia, dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Setiap warga Indonesia berhak atas lingkungan yang aman dan sehat. (UU No. 32, 2009). Namun, kondisi lingkungan manusia saat ini menderita penurunan kualitas akibat penyerangan. Salah satu masalah lingkungan yang saat ini kita hadapi adalah sampah, namun tidak banyak organisasi yang didedikasikan untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh sampah. Indonesia, sebagai negara berkembang, juga menghadapi tantangan serupa dalam mengatasi masalah sampah.

Besarnya penduduk dan keragaman aktivitas di kota-kota Indonesia, mengakibatkan munculnya persoalan dalam pelayanan prasarana perkotaan, seperti masalah sampah. Sampel yang diproduksi di Indonesia digunakan untuk memantau ekosistem dan lingkungan karena tidak disimpan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan tidak hancur. Komposisi bahan limbah di Indonesia termasuk 60% limbah organik, 14% limbah plastik, 9% kertas limbah, 4,3% limbah logam, dan 12,7% limbah lainnya.

Sejak saat ini, paradigma pengolahan sampah adalah KUMPUL – ANGKUT dan BUANG, dan langkah pertama bagi setiap kota dalam menangani masalah limbah ialah membuang limbah bahan di tempat pembuangan sampah. (Haerani et al., 2019)

Faktor pendukung kurangnya dari pengelolaan sampah yang baik, diantaranya adalah daerah Tasikmalaya masih banyak warga yang tinggal berdekatan dengan TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) perlunya pada pemerintah lingkungan hidup adanya kerja sama dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi setiap golongan pemerintah mengeluarkan peraturan sesuai dengan aturan yang di atasnya untuk kepentingan masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi dan menangani sampah dengan berwawasan lingkungan.

Di Kota Tasikmalaya sendiri sampah yang berada di lingkungan TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) tersebut merupakan isu yang harus segera di selesaikan khususnya di TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) masih adanya Masyarakat yang tidaknyaman atas tercemarnya bau sampah di sekitaran tersebut membuat masyarakat sekitar tidak nyaman akan lingkungan tersebut karna sampah di dalam tersebut di campur dan membusuk hingga dapat menyebabkan penyakit yang tidak di inginkan.

Menurut data yang di dapat dari (InilahTasik) Akibat adanya peningkatan dalam produksi sampah sehingga terjadinya overload dan kapasitas yang berada di lokasi TPAS sangat menumpuk dan mengurai hingga sampai mengurai kedepan akibat terlalu lama di biarkan menumpuk, dan sampah yang berada di dumo truk tersebut menimbulkan lingkungan sekitar mecium bau tidak sedap.

Keberadaan sampah di Kota Tasikmalaya daerah ciangir kecamatan tamansari kabupaten Tasikmalaya masih menjadi pembahasan yang serius tentang penanganan

dalam pengelolaannya, karena tidak jauh jarak dari penduduk dapat mengakibatkan berbagai hal yang negative seperti terjadinya demam berdarah disebabkan sarang nyamuk yang berasal dari sampah, muntaber dan penyakit lainnya yang disebabkan dari alat yang bersarang disampah pentingnya untuk diselaikan oleh karena itu, hal ini harus mejadi focus bagi pemerintah Kota Tasikmalaya agar masyarak di sekitaran TPAS tersebut bisa menghirup udara dengan bersih.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Pemerintah perlu menerapkan konsep perumusan kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah tersebut. Secara konsep, dalam proses perumusan kebijakan, terdapat beberapa unsur yang dapat mempengaruhi hasil dari perumusan tersebut, salah satunya adalah adanya artikulasi kepentingan. Yang dimaksud artikulasi kepentingan di sini ialah adanya bentuk pengarus dari para pihak yang memiliki kepentingan dengan adanya dampak dari TPAS di lingkungannya. Fokus kepentingan yang dikedepankan dalam hal ini dilatarbelakangi dengan terganggunya hak dari pihak yang berkepentingan tersebut yang menuntut adanya sikap dari Pemerintah berupa kebijakan yang ditujukan untuk mengatur permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang mengenai permasalahan lingkungan yang bersifat kompleks akibat timbulan sampah diperlukan untuk membentuk kesadaran Pamarintah Kota Tasikmalaya Faktor penyebab kepedulian lingkungan didasari cara berpikir dan perilaku manusia. Partisipasi aktif warga menjadi hal yang penting untuk diidentifikasi dalam aksi pengelolaan sampah. Upaya menjaga kelestarian lingkungan dan pencemaran lingkungan TPAS (Tempat Pembuangan Sampah Akhir) harus bermula dari diri individu dengan memulai dengan melakukan hal-hal kecil. Perubahan yang dilakukan kemudian dapat ditularkan menjadi kebiasaan dalam keluarga ataupun masyarakat, sehingga terjadi perubahan besar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan bahwa terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana dampak bau sampah terhadap masyarakat di lingkungan sekitar TPAS?
2. Bagaimana dampak artikulasi kepentingan oleh masyarakat sekitar TPAS terhadap proses perumusan kebijakan pengelolaan sampah?
3. Bagaimana upaya Pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak bau sampah terhadap masyarakat di lingkungan sekitar TPAS serta bagaimana dampak artikulasi kepentingan oleh Masyarakat di sekitar TPAS dalam proses perumusan kebijakan pengelolaan sampah sebagai upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap lingkungan setempat.
 - b) Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam melakukan perumusan kebijakan yang didasarkan pada konsep pembuatan kebijakan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi acuan bersikap terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap lingkungan setempat terkhusus terkait langkah-langkah dalam penyampaian kepentingan.

- b) Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melakukan perumusan kebijakan sekaligus sebagai bahan evaluasi kebijakan yang berdampak pada lingkungan hidup.

E. Tinjauan Pustaka

Moh. Daud Marasabessy dan Idris Rumodar (2022), dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Dampak Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Ambon (Studi Kasus Pasar Mahardika), menjelaskan bagaimana proses implementasi kebijakan yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Pasar Mahardika Kota Ambon yang dilihat dari segi efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Berdasarkan tujuan penelitian Moh. Daud Marasabessy tersebut, ia menyatakan bahwa tujuan penelitian itu untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah terhadap dampak kehidupan sosial masyarakat Kota Ambon. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat indikasi belum optimal pada aspek sumberdaya yaitu sarana penunjang volume sampah yang dihasilkan setiap hari.

Dihubungkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, terdapat beberapa kesamaan yang akan penulis gunakan untuk menyusun skripsi, yaitu penggunaan metode kualitatif dan penggunaan teori implementasi kebijakan dari Edward III karena menurut penulis terdapat beberapa hal yang akan memberi dampak terhadap kesadaran masyarakat mengenai kebijakan pengelolaan sampah yang dapat dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada jurnal kedua yang ditulis oleh Edy Nurcahyo dan Ernawati (2019), pada jurnal yang berjudul Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Mabulugo, Kabupaten Buton, menjelaskan bahwa hukum publik yang mengatur kelestarian lingkungan dari dampak negatif sampah telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan sudut pandang pengelolaan sampah di tiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Berdasarkan tujuan penelitian mereka tersebut, mereka menyatakan bahwa pada penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di desa Mabulugo, dengan cara memberikan penyuluhan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa aspek hukum mengenai pengelolaan sampah sebagai berikut, tinjauan yuridis terhadap pengelolaan sampah di Indonesia, Kebijakan publik dalam pengelolaan sampah dalam Upaya menjaga kelestarian lingkungan, paradigma pengelolaan sampah rumah tangga, kebijakan pemerintah desa terhadap pengelolaan sampah Rumah Tangga, Pelaksanaan penyuluhan hukum pengelolaan sampah di desa Mabulugo.

Dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat kesamaan pada metode penelitian dengan metode penelitian kualitatif karena menurut penulis penggunaan metode ini akan membuat peneliti leluasa dalam mendapatkan informasi seluas-luasnya pada objek yang akan diteliti.

Jurnal selanjutnya ditulis oleh Muhammad Ibrahim Sahupala (2020), dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil dan tidaknya di implementasikan tergantung oleh variabel – variabel bebas yang akan menuntun dalam mencapai prestasi kerja. Berdasarkan tujuan

penelitian ini, Muhammad Ibrahim Sahupala menyatakan bahwa pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah lingkungan hidup yang ada di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup telah dilaksanakan, komunikasi dilakukan secara terbuka kepada masyarakat dengan mensosialisasikan peraturan tersebut.

Dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat kesamaan pada metode penelitian dengan metode penelitian kualitatif dan objek penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan tempat yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya.

Nur Aisyah (2019), dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip *Good Environmental Governance*, menjelaskan mengenai pengaturan pengolahan sampah telah diatur dalam UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan diakomodir dalam Qanun kota Langsa No 3 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah apabila daerah mampu mengelola sampahnya dengan baik maka pelaksanaan terhadap prinsip *Good Environmental Governance* sudah dapat dikatakan terpenuhi. Berdasarkan tujuan penelitian ini, Nur Aisyah selaku penulis menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Langsa terhadap pengelolaan sampah sudah memenuhi prinsip *Good Environmental Governance* atau belum memenuhi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah kota Langsa dalam

menerapkan prinsip *Good Environmental Government* dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

Dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat kesamaan pada metode penelitian dengan metode penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan metode ini dapat melihat objek dari sudut pandang luas.

Dita Angraeni Sutiawati, Muhammad Tang Abdullah, dan Andi Ahmad Yani (2019) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul, Mempertimbangkan Manfaat Program Bank Sampah untuk Penduduk Kota: Penelitian dari Kota Makassar menjelaskan program sampah bank untuk menangani masalah pengelolaan limbah, yang merupakan masalah utama, dengan menerapkan 3R (reducing, reuse, recycle) sistem pengurusan limbah. Banyak program yang tersedia di Makassar untuk menangani masalah kebersihan; di antaranya adalah program bank sampah, yang membantu pemerintah dalam membatasi produksi limbah dan dapat mendidik masyarakat sehingga mereka menyadari masalah kebersihan. Berdasarkan tujuan penelitian mereka, mereka menyatakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dampak program bank sampah bagi masyarakat umum di daerah bakung. Metode analisis yang digunakan disebut analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah menerima manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari program bank sampah. Secara ekonomi, mereka dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dan secara sosial, mereka dapat meningkatkan interaksi sosial, pengelolaan sampah, dan kerajinan. Dalam hal lingkungan, masyarakat memiliki kemampuan untuk memilah sampah menurut jenisnya dan merasa aman dengan lingkungan mereka.

Dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat kesamaan pada metode penelitian kualitatif, menurut penulis dikarenakan penelitian

sejenis akan lebih efektif jika dilakukan penelitian dengan metode kualitatif. , menurut penulis dikarenakan penelitian sejenis akan lebih efektif jika dilakukan penelitian dengan metode kualitatif.

Toif Fadzoli, Rahayu Subekti, dan Waluyo (2023), dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa timbulan sampah yang semakin tidak terkendali dan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengelola sampah menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung selesai. Berdasarkan tujuan penelitian yang mereka lakukan, mereka menyatakan bahwa pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah yang akan menjadi parameter kinerja pemerintah di bidang lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan sampah, seperti daur ulang sampah oleh masyarakat, belum sempurna, yang dapat menyebabkan timbulan sampah meningkat setiap tahunnya. Pengendalian timbulan sampah menjadi sulit karena tidak ada standar yang dibuat untuk membatasi jumlah timbulan sampah dan banyak tempat pembuangan sampah yang tidak memenuhi standar pemerintah. Pemerintah belum sepenuhnya berhasil menyampaikan informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat; oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk berkomunikasi satu sama lain untuk menemukan solusi untuk masalah sampah.

Dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat kesamaan pada metode penelitian dengan metode penelitian kualitatif karena menurut penulis penguasaan metode ini akan membuat peneliti leluasa dalam mendapatkan informasi seluas-luasnya pada objek yang akan diteliti.

Jurnal berikutnya yang ditulis oleh William Djani, Jacob Wadu, dan Primus Lake (2019) yang berjudul Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang menjelaskan bagaimana upaya Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang untuk mewujudkan Kota Kupang yang bersih dan sehat melalui kebijakan pengelolaan sampah yang mengutamakan partisipasi masyarakat. Sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dan komponen lainnya, sangat penting untuk membuat kebijakan persampahan yang baik sehingga para aktor dapat memahami dan melaksanakan peran mereka secara optimal. Ini adalah hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal yang mendukung perubahan. Dalam hal kebijakan pengelolaan sampah, ada dua kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok yang berkuasa, seperti pemerintah kota, dan yang kedua adalah kelompok masyarakat, bersama dengan organisasi lain yang harus bekerja sama untuk menangani sampah. Berdasarkan tujuan penelitian mereka tersebut, mereka menyatakan bahwa pada penelitian ini memiliki tujuan untuk kebijakan yang dibuat mengenai pengelolaan masyarakat yang dibuat dengan partisipasi masyarakat yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang, pada umumnya masih sebatas wacana, masyarakat belum dilibatkan dalam ranah kebijakan. Rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas, keterbatasan sumberdaya dan juga keterbatasan anggaran.

Dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat kesamaan pada metode penelitian dengan metode penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan metode ini dapat melihat objek dari sudut pandang luas.

Nunun Nurhajati (2022), dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Implementasi Program Bank Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Mengurangi Penumpukan Sampah Di Kabupaten Tulungagung, menjelaskan bagaimana salah satu strategi untuk mengurangi penumpukan sampah di Kabupaten Tulungagung yang terus diupayakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat di dalam mengurangi penumpukan sampah tersebut. Berdasarkan tujuan penelitian Nunun Nurhajati, ia menyatakan bahwa pada penelitian ini memiliki tujuan agar penumpukan sampah bisa dikelola melalui program bank sampah yang berbasis partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi program bank sampah efektif memaksimalkan keikutsertaan masyarakat ditinjau dari keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkatan input dan output dan pencapaian tujuan menyeluruhnya meskipun pelaksanaannya belum maksimal.

Dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat kesamaan pada metode penelitian dengan metode penelitian kualitatif karena menurut penulis penguasaan metode ini akan membuat peneliti leluasa dalam mendapatkan informasi seluas-luasnya pada objek yang akan diteliti.

Jurnal berikutnya yang ditulis oleh Kaveri Kala, Nomes B. Bolia, Sushil (2020) yang berjudul Waste Management Communication Policy for Effective Citizen Awareness menjelaskan Pengelolaan Sampah Kota (MSWM) memiliki implikasi yang jelas terhadap kelayakan hidup kota dan kesehatan masyarakat. Sayangnya, MSWM seringkali dianggap hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja. Di sisi lain, hampir semua pemangku kepentingan utama di seluruh dunia sepakat mengenai perlunya warga negara untuk melibatkan diri mereka dengan baik dalam proses ini

karena mereka adalah penghasil utama limbah padat perkotaan. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat dan komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat merupakan hambatan utama dalam mewujudkan hal ini. Berdasarkan tujuan penelitian mereka tersebut, mereka menyatakan bahwa pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui inisiatif kebijakan yang dapat menjembatani kesenjangan komunikasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa WMCP menyebarkan saluran yang relevan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye yang ditargetkan. diketahui bahwa mengubah perilaku pengelolaan sampah bukanlah hal yang mudah. Tidak ada satu model pun yang memungkinkan pembuat kebijakan mengubah tindakan rumah tangga dalam pengelolaan sampah. Namun, memulai dan menerapkan kebijakan yang meningkatkan komunikasi antara seluruh pemangku kepentingan dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai perspektif mengenai sampah dan pengelolaannya.

Dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat kesamaan pada Tema penelitian dan variabel penelitian pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat.

Jurnal selanjutnya yang ditulis Yao Wang, Yu Shi, Jizhi Zhao, Tek Maraseni, Guangren Qian (2021), yang berjudul *Implementation Effect of Municipal Solid Waste Mandatory Sorting Policy in Shanghai* menjelaskan status keseluruhan dan tantangan pengelolaan sampah kota (MSW) di Shanghai berdasarkan aturan pemilahan sampah wajib diselidiki. Kami melacak efisiensi klasifikasi sampah kota, karakteristik fisikokimia sampah yang dipisahkan, dan emisi karbon yang timbul dari sistem pembuangan sampah. Berdasarkan tujuan penelitian mereka tersebut, mereka menyatakan bahwa pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak dari

penerapan kebijakan pemilahan sampah wajib di kota Shanghai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dengan penerapan aturan pemilahan sampah yang baru, rata-rata timbulan sampah harian yang diklasifikasikan (untuk sampah makanan rumah tangga, sampah sisa, sampah daur ulang, sampah berbahaya, masing-masing menjadi lebih tinggi) (Tabel 1) berubah secara signifikan di Shanghai dari bulan Juni 2019 hingga Juni 2020. Terlihat bahwa rata-rata produksi sampah harian rata-rata sedikit berfluktuasi, yaitu sekitar 30 ribu ton, kecuali dampak COVID-19 pada bulan Maret 2020. Sedangkan perubahan yang terjadi jumlah produksi limbah yang dipisahkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari sistem baru. Selama kurun waktu satu tahun, rata-rata timbulan harian sampah makanan rumah tangga, sampah daur ulang, sampah B3 meningkat signifikan dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 38,59 %, 70,34 % dan 1122,22 %. Sedangkan sisa sampah mengalami penurunan sebesar 20,10 %, hal ini menunjukkan bahwa sampah-sampah lainnya dimasukkan ke dalam tong sampah yang sesuai secara teratur dan tidak tercampur dalam sisa sampah.

Dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat kesamaan pada tema penelitian dan variabel penelitian dampak kebijakan pengelolaan sampah.

F. Kerangka Teori

1. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuantujuan itu (Budiharjo, 1992) . Kemudian kebijakan menurut David Easton ialah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan (Abidin, 2004). Berdasarkan informasi tentang kebijakan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dapat dilakukan secara umum; namun, dalam prakteknya, hal ini lebih sering dan secara eksplisit digunakan dalam tindakan-tindakan, atau sebagai perilaku pemerintah dan kebijakan nasional, yang lebih sering disebut kebijakan negara atau kebijakan publik. Namun, definisi kebijakan publik, atau kebijakan negara-negara, juga didefinisikan secara berbeda oleh Muslim, seperti yang dinyatakan oleh Dye in (Islamy, 1998) yang mendefinisikannya sebagai “apa pun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan.” (i.e., whatever actions the government decides to take or not take). Lebih tepatnya, Dye menyatakan bahwa jika pemerintah harus melakukan tugas apa pun, itu harus memiliki tujuan, objektif, dan menggabungkan semua instruksi pemerintah.

Berdasarkan pengetahuan tentang kebijakan publik dan hukum yang telah dijelaskan di atas, Islam menggambarkan beberapa elemen penting dari kebijakan nasional, atau kebijakan umum, yang sebagai berikut:

- a. Negara itu kebijakan secara perdana adalah penetapan tindakan-tindakan pemerintah.

- b. Negara itu kebijakan tidak hanya ditawarkan, tetapi diampaiakan dalam bentuk nyata.
- c. Kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perlu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan Negara harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat (Islamy, 2000).

2. Proses perumusan kebijakan

a. Pengertian perumusan kebijakan

Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Perlu diingat pula bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi, sebab sering kali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah sebuah konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi (Putra, 2001).

Dalam tataran konseptual perumusan kebijakan tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pemimpin yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik (*publik opinion*) dan suara publik (*publik voice*), seperti dijelaskan oleh (Parson, 1997). Hal ini disebabkan oleh proses pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah bebas nilai (*value free*) sehingga berbagai kepentingan akan selalu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

b. Tahapan perumusan kebijakan

Dengan demikian, pengertian perumusan kebijakan menyangkut suatu proses yang terdiri dari sejumlah Langkah-langkah. (Franklin, 1985) menjelaskan beberapa langkah dalam kebijakan publik, yaitu:

- 1) *Agenda setting*
- 2) *Formulation dan legitimization*
- 3) *Program Implementations*
- 4) *Evaluation of implementation, performance, and impacts*
- 5) *Decisions about the future of the policy and program*

Beberapa pakar menjelaskan bahwa proses perumusan kebijakan publik selalu dan harus memperhatikan beberapa karakteristik penting agar dapat mencapai sasaran kebijakan yang dituangkan dalam tahapan implementasi kebijakan. Misalnya, dijelaskan oleh (Jones, 1996) bahwa ada empat varian kelompok kepentingan bila dilihat atas interest dan akses serta kebutuhan masyarakat pada perumusan kebijakan publik, yaitu:

- a) kelompok kepentingan yang terorganisasi dengan baik dengan akses yang mapan
- b) kelompok kepentingan yang terorganisasi dengan baik tanpa akses yang mapan
- c) kelompok kepentingan yang tidak terorganisasi dengan baik tetapi memiliki akses yang mapan, dan
- d) kelompok kepentingan yang tidak terorganisasi sekaligus juga tidak memiliki akses yang mapan.

c. Model perumusan kebijakan

Membuat atau merumuskan kebijakan bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Hal ini disebabkan banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan dibuat bukan semata-mata untuk kepentingan politis tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan.

Perumusan kebijakan akan lebih mudah dimengerti apabila menggunakan suatu model atau pendekatan tertentu. Oleh karena itu, beberapa ahli mengembangkan model-model perumusan kebijakan untuk mengkaji proses perumusan kebijakan agar lebih mudah dipahami. Dengan demikian, pembuatan model-model perumusan kebijakan digunakan untuk lebih menyederhanakan proses perumusan kebijakan yang berlangsung secara rumit tersebut.

Model perumusan kebijakan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Model Rasional Komprehensif, yaitu dalam proses penyusunan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi dan aspek ekonomis. Cara-cara memformulasikan atau merumuskan kebijakannya sesuai urutan adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya
- b. Menemukan pilihan-pilihan
- c. Menilai konsekuensi masing-masing pilihan
- d. Menilai rasio nilai sosial yang dikorbankan
- e. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

Apabila dirunut, model ini merupakan model ideal dalam merumuskan kebijakan, dalam arti mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas kebijakan. Studi-studi kebijakan biasanya memfokuskan pada tingkat efisiensi dan keefektifan kebijakan (Nugroho, 2006). Unsur-unsur utama dari teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain.
- 2) Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau saran yang memedomani pembuat keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rangkingnya sesuai dengan urutan kepentingannya.
- 3) Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama.
- 4) Teliti juga akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih.
- 5) Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif lain yang ada.
- 6) Pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya, yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai atau sasaran yang telah digariskan (Abdul Wahab, 2005).

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Parsons, 1997). Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang

cukup panjang. Thomas R. Dye (Dye, 2005) menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di antaranya:

- 1) Identifikasi masalah kebijakan
- 2) Penyusunan agenda
- 3) Perumusan kebijakan
- 4) Pengesahan kebijakan
- 5) Implementasi kebijakan
- 6) Evaluasi kebijakan.

d. Contoh perumusan kebijakan

Contoh dari proses perumusan kebijakan yaitu proses perumusan kebijakan penataan pemukiman di DKI Jakarta. Jejaring kebijakan di dalam proses perumusan kebijakan permukiman di Provinsi DKI Jakarta ini terlihat ketika terjadi serangkaian hubungan kelembagaan formal dan informal antara pemerintah dan aktor-aktor lain yang disusun berdasarkan kepentingan bersama dalam pembuatan kebijakan dan implementasi public (R.A.W, 2007). Hubungan yang terjadi adalah hubungan antara kelompok informal (JRMK, UPC dan warga kampung) dengan kelompok formal Pemprov DKI Jakarta (gubernur dan birokrasi) untuk merumuskan kebijakan permukiman (Mahmud, 2020).

3. Artikulasi kepentingan

a. Pengertian Artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan merupakan proses penampungan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong Masyarakat. Fungsi

artikulasi kepentingan ini biasanya dilakukan oleh struktur yang disebut dengan Interest Group atau kelompok kepentingan.

b. Cara menyampaikan artikulasi kepentingan

Adapun cara atau strategi yang dipakai untuk mempengaruhi pemerintah adalah (Hovland., 2004):

- 1) Kelompok Kepentingan melakukan *lobbying* menjalin komunikasi langsung dengan para pejabat pemerintah yang terkait, atas isu yang diperjuangkan. Wise Cummings mendefinisikan lobby sebagai, *communication with legislator or other government officials to try to influence their decision* (Cummings, 1981). Berdasarkan definisi tersebut lobby bukan semata-mata ditujukan terhadap pejabat-pejabat legislatif saja tetapi juga cabang-cabang pemerintahan yang lain. Tidak sedikit kelompok-kelompok kepentingan khususnya yang kuat memiliki peloby-peloby khusus atau menyewa (membayar) seorang peloby professional yang memiliki kemampuan khusus di bidang tersebut. Aktifitas lobby memerlukan keterampilan khusus dan jaringan pergaulan luas. Bidang ini lebih merupakan satu seni daripada ilmu. Profesi peloby disejumlah negara maju telah menjadi bagian dari pekerjaan resmi yang setara dengan profesi moderen yang lain.
- 2) Melalui media massa. Kelompok kepentingan biasanya menggunakan media massa sebagai sarana untuk menarik sentimen serta perhatian umum, sehingga pemerintah mengambil kebijakan atas isu tertentu sesuai yang diinginkan. Pesan-pesan yang disampaikan melalui media diharapkan segera mendapat respon yang memadai dari pemerintah. Namun melalui cara ini tidak ada kontak langsung dengan pejabat pemerintah.

3) *Grass-roots pressure*, dimana kelompok kepentingan menggalang dukungan masyarakat lapis bawah untuk menyampaikan isu-isu tertentu. Misalnya melalui rapat akbar, pawai massal, demonstrasi, aksi teatral di tempat-tempat umum ataupun gedung pemerintah. Melalui cara ini memang ada kontak langsung dengan pejabat pemerintah, tetapi terbatas, dan mungkin saja manipulatif dan situasional.

c. Contoh artikulasi kepentingan

1). Konvensional

Contohnya: Di Inggris, Partai Konservatif harus bersaing dengan Partai Buruh dan Liberal dalam memperoleh dukungan dari berbagai kelompok kepentingan di negaranya. Dalam usaha memenangkan persaingan partai konservatif mengundang kelompok-kelompok ekonomi, regional, atau lokal untuk menyatakan keinginan mereka dan untuk ikut mempengaruhi kebijaksanaan Partai Konservatif melalui kegiatan-kegiatan perkumpulan masyarakat dan konferensi tahunan partai dan dalam komite-komite Partai Konservatif yang ada dalam parlemen. Partai Konservatif bisa melakukan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan itu tetapi tidak bisa menguasainya pada partai (Solihin, 2018).

2.) Non Konvensional

Protes dan Demonstrasi: Demonstrasi jalanan, protes, dan aksi-aksi kolektif seringkali digunakan sebagai cara non-konvensional untuk menarik perhatian terhadap isu-isu tertentu.

Media Sosial: Penggunaan media sosial untuk mengorganisir kampanye online dan mengumpulkan dukungan adalah contoh metode non-konvensional yang semakin umum digunakan.

Kampanye Online: Kampanye petisi online, kampanye dana crowdfunding, dan kampanye penggalangan dana online adalah cara non-konvensional untuk mendapatkan dukungan dan mempengaruhi kebijakan.

Aktivisme Online: Aktivis online dapat menggunakan blog, podcast, dan video untuk menyuarakan kepentingan mereka dan membangun dukungan. Aksi

Hukum: Mengajukan tuntutan hukum atau menggunakan litigasi sebagai cara untuk memengaruhi perubahan kebijakan atau undang-undang juga dapat dianggap sebagai pendekatan non-konvensional.

d. Bentuk artikulasi kepentingan

Setiap individu, atau bahkan sekelompok individu, sebagai warga negara suatu negara, memiliki kekhawatiran khusus. Penting-kepentingan ini dapat bergerak dengan lancar, dapat berbeda satu sama lain, dan dapat bergaul satu dengan yang lain. Politisi harus dapat secara efektif mengkomunikasikan kekhawatiran publik kepada pemerintah selama proses merumuskan kebijakan publik, sehingga kebijakan umum yang diterapkan pemerintah akan mampu menangani kekhawatirannya.

Artikulasi yang paling umum dalam semua sistem politik adalah permohonan individu yang diterapkan pada dewan, atau untuk kepala eksekutif, kepala pejabat administrasi, dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok ini adalah: menghapuskan kepentingan, kebutuhan, dan tuntutan, kemudian menyeleksi sampai dimana hal ini bersentuhan dengan kelompok yang diwakili. Fungsi dari kepentingan artikulasi ini biasanya dilakukan oleh struktur yang dikenal sebagai kelompok kepentingan atau *interest group*.

Interes group atau kelompok kepentingan diajukan masyarakat awalnya menampung kepentingan-kepentingan kelompok. Selanjutnya, kelompok kepentingan yang disebutkan di atas menciptakan rumus untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Selanjutnya, partai-partai politik, termasuk pemerintah, didorong untuk menciptakan kebijaksanaan, dan diharapkan bahwa ini akan mengakibatkan tanggapan yang kadang-kadang dapat membuat kebijaksanaan yang akan memungkinkan masyarakat tadi menjadi lebih rentan.

Menurut (Rahman, Sistem Politik Indonesia, 2007), Fungsi artikulasi melayani tujuan mengekspresikan atau menyampaikan kekhawatiran masyarakat kepada otoritas politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk dengan orang lain yang berbagi kekhawatirannya yang serupa. Jenis artikulasi politik yang paling umum dalam semua sistem politik adalah aplikasi individualis dari permohonan kepada anggota parlemen, kepala negara, masyarakat tradisional, atau kepala desa atau ketua suku.

Menurut (Rahman, 1998) Eksekusi fungsi artikulasi kepentingan mungkin eksplisit atau implisit, terfokus atau tersebar, luas atau spesifik, instrumental atau afektif. Karakteristik pasangan-pasangan ini menyoroti pendekatan yang diambil oleh masyarakat umum dalam mengekspresikan kekhawatiran dan saran kepada pemerintah. Oleh karena itu, poin-poin yang dibuat dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada Pemerintah yang didorong. Cara yang dapat ditempuh dalam artikulasi kepentingan menurut (Rahman, 1998) meliputi:

1) *Manifest* atau *latent*, Artikulasi kepentingan secara *manifest*/tegas merupakan

Artikulasi pendapat yang diungkapkan dengan jelas dan ringkas, di sisi lain, dapat mengungkapkan cacat atau kelemahan yang dapat dimengerti dan kemudian ditransfer ke sistem politik. Perbedaan antara keduanya terletak pada

cara masing-masing kepentingan-kepentingan individu mereka dinyatakan dan ditangani. Ekspresi kebutuhan dalam bentuk yang jelas diungkapkan dalam kata-kata eksplisit, kemudian diterjemahkan lebih lanjut ke dalam sistem politik. Formulasi kepentingan-kepentingan yang tersembunyi atau tidak nyata tidak dinyatakan secara eksplisit; sebaliknya, itu hanya menunjukkan proses dengan mana kepentingan-kepentingan yang disebutkan sebelumnya diterjemahkan ke dalam sistem politik.

2) *Diffusi* atau *Specific*, Artikulasi secara *diffuse*/garis besar. Tentu saja, mereka akan memberikan petunjuk yang akurat tentang kebijakan untuk menunjukkan rasa kepentingan-kepentingan. Masyarakat umum mengungkapkan ketidakpuasan, tetapi mereka tidak memberikan alternatif untuk memecahkan masalah atau menunjukkan bagaimana memperbaikinya. Tidak seperti tips khusus atau tips rinci, tips spesifik lebih mungkin menunjukkan cara memperbaikinya atau menyediakan jalur alternatif.

3) *General* atau *particular*, Partisipasi massa yang dilakukan secara umum, partisipasi massa yang ditujukan kepada individu atau kelompok guna mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Kriteria atau tuntutan yang diartikulasikan menunjukkan kepada kepentingan orang asumptif atau kelompok besar warga masyarakat. Ditambah dengan tuntutan/kepentingan yang ditambah secara *specific*, yaitu *particular* atau pengecualian dari orang tertentu atau keluarga tertentu.

4) *Instrumental* atau *Affective*, Ketika diterapkan secara instrumental, artikulasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan atau kesepakatan dengan konsekuensi apapun. Di sisi lain, karya seni emosional dapat menyampaikan ekspresi rasa syukur, cinta, ketakutan, atau harapan. Menarik perhatian pada

masalah ini atau menyoroti pentingnya akan mengekspos atau menantang budaya politik kelompok-kelompok yang terkena dampak. Melalui perasaan, artikulasi dalam cara instrumental / afektif memungkinkan cara ekspresi yang lebih fleksibel.

4. Pengelolaan sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah, yakni dengan menggunakan prinsip empat (4R) untuk mengatasi masalah sampah adalah sebagai berikut:

- 1) *Reduce* (Mengurangi), yaitu berhati-hati dalam meminimalkan penggunaan bahan atau benda;
- 2) *Reuse* (Menggunakan kembali), yaitu menggunakan bahan atau benda yang dapat digunakan kembali;
- 3) *Recycle* (Mendaur ulang), yaitu menggunakan kembali barang-barang yang tidak lagi diperlukan atau digunakan untuk memastikan keuntungannya dan mempertahankan nilai aslinya;
- 4) *Replace* (Mengganti), yaitu yaitu, menggantikan setiap item dengan satu yang dapat digunakan secara teratur (Ediana, 2018).

Pengelolaan kebersihan terdiri dari pengelolaan sampah. Selain menandakan bahwa tidak ada lagi sampah, pengertian bersih pada hakekatnya juga mengandung informasi yang merugikan tujuan estetika. Terdapat 3 (tiga) hal

yang menjadi perhatian utama dan harus dipertimbangkan secara matang dalam pengelolaan sampah, yaitu (Inoguchi, 2003):

- 1) Mengidentifikasi kondisi saat ini dari sistem pengelolaan sampah;
- 2) Menyediakan definisi yang jelas dan akurat dari manajemen sampah; dan
- 3) Memperjelas prosedur untuk penghapusan dan daur ulang.

Oleh karena itu, manajemen limbah dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan yang dilakukan untuk mengelola limbah dari saat itu dihasilkan hingga penghapusan pada akhirnya. Dalam arti luas, kegiatan pengelolaan limbah meliputi produksi limbah, pengumpulan limbah, penghapusan limbah dan pembuangan limbah setelah digunakan. Penanganan sampah tidaklah kompleks, melainkan. Ini karena melemahkan aspek ilmiah, ekonomi, dan sosial. Sistem pengelolaan sampah merupakan oroses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek. Kelima aspek tersebut berkaitan erat satu dengan yang lainnya yang akan membentuk satu kesatuan, sehingga upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah harus meliputi berbagai sistem. Adapun aspek-aspek tersebut adalah:

- 1) Aspek kelembagaan;
- 2) Pembiayaan;
- 3) Pengaturan;
- 4) Teknik operasional; dan
- 5) Peran serta masyarakat.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini ialah proses perumusan kebijakan diartikan sebagai cara untuk memecahkan suatu masalah yang dibentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik.

Contoh sederhana dari penggunaan arti konfensional dalam definisi konseptual adalah ketika seseorang mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana rakyat memilih para pemimpin mereka melalui pemilihan umum." Dalam definisi ini, kata-kata seperti sistem pemerintahan, rakyat, pemimpin, dan pemilihan umum adalah contoh dari arti konfensional yang digunakan untuk menjelaskan konsep demokrasi.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini ialah terkait artikulasi kepentingan dan cara penyampaian. Dari artikulasi kepentingan tersebut terhadap fenomena yang terjadi dengan sejumlah instrumen yaitu: *Lobbying*, media massa, *grass root pressure*.

Variable	Indikator	Parameter
Artikulasi	Lobbying	Komunikasi antara individu/kelompok kepada pemangku kepentingan
	Media Massa	Memberikan informasi atau keluhan melalui berita online atau media sosial
	Grass Root Pressure	kelompok kepentingan menggalang dukungan untuk menyampaikan isu-isu tertentu

I. Kerangka Berfikir

Dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian, peneliti hendak menjabarkan terkait bagaimana kerangka berfikir yang terdiri dari beberapa unsur yaitu sampah, dampak sampah terhadap lingkungan, pemahaman terkait konsep pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan artikulasi kepentingan yang dituangkan dalam proses perumusan kebijakan yang bertujuan mengatur jalannya konsep pengelolaan sampah. Berdasarkan hal tersebut, penulis menemukan adanya kondisi yang hadir dalam kehidupan masyarakat yaitu terkait dampak dari sampah dan pengelolaannya yang didasarkan oleh suatu kebijakan, di mana kebijakan tersebut merupakan buah pemikiran dari kepentingan masyarakat yang terdampak dari sampah tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, dibutuhkan elemen pendukung yaitu masyarakat itu sendiri yang didasarkan pada kesadaran untuk dapat melakukan manajemen pengelolaan sampah yang baik sehingga mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.

J. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan, memahami, dan menganalisis sifat suatu fenomena atau peristiwa yang timbul dari aktivitas manusia dan bertahan dalam situasi saat ini. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami objek yang dipelajari dengan cara yang komprehensif. Menurut (Zainuddin, 2008) Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menggunakan data empiris untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hal yang sama berlaku untuk desain penelitian kuantitatif dan kualitatif; Namun, apa yang membedakan mereka adalah independensi dan komitmen peneliti.

Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam mempelajari dampak artikulasi pada komunitas lokal yang mengelilingi TPAS diperlukan karena fenomena yang dipelajari para peneliti, yang membutuhkan data lapangan dengan akurasi fakta melalui analisis yang hati-hati. Karena fakta bahwa metode kualitatif penelitian, secara keseluruhan, dimaksudkan untuk penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan penyebab, para peneliti percaya bahwa melalui menggunakan metode penelitian ini, peserta akan dapat memahami atau memperoleh wawasan dari obyek penelitian.

Untuk menggambarkan bagaimana Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat di Kota Tasikmalaya, para penyelidik menggunakan penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan, dokumentasi, dan wawancara diperlukan, hasil data tidak menggunakan statistik atau angka. Menurut (Zainuddin, 2008) Metode ini berharap bahwa menggunakan kaedah ini akan memberikan gambaran yang lebih terperinci dan wawasan tentang proses sosial dan realiti yang akan diamati. Tidak perlu untuk mengisolasi satu orang atau organisasi dalam variabel atau hipotesis. Sebaliknya, perlu untuk mempertimbangkan bagian dari keseluruhan. Penelitian kualitatif sangat berguna untuk memahami fenomena sosial melalui contoh holistik dan meningkatkan jumlah pemahaman yang membuat makna.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) Kota Tasikmalaya, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya.

3) Jenis Data

Menurut (Widi, 2010) Data dalam penelitian kualitatif deskriptif dapat bersifat kategori atau bukan angka, terdiri dari observasi dan data yang kemudian dianalisis dengan cara yang dikategorikan. Jenis dan total data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori:

1. **Data Primer** Menurut (Idrus, 2009) Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang belum dipublikasikan (buku dan artikel) yang berisi pengetahuan latar belakang tentang data tersebut. Sumber data diketahui daripada peneliti dengan narasumber dan observasi di lokasi penelitian, melalui wawancara langsung.
2. **Data Sekunder** Menurut (Sarwono, 2006) Data sekunder adalah informasi yang tersedia dan akan ditampilarasi oleh peneliti secara efektif, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data awal yang telah dikumpulkan oleh para peneliti sebelumnya. Informasi yang termasuk dalam kategori data kedua adalah sebagai berikut: (1) Data teks termasuk dokumen, catatan, grafik, dan grafik. (2) Gambar dalam bentuk papan iklan, foto, dan animasi (3) Format data termasuk hasil Kaset dan tes lainnya.

4) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan untuk memenuhi tujuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode: observasi, dokumentasi, dan teknik bentuk gelombang.

1. **Wawancara** Menurut (Herdiansyah, 2010) Ada tiga jenis wawancara yang dipertimbangkan dalam penelitian kualitatif wawancara: terstruktur

wawancara, semi-terstruktur wawancara, dan tidak wawancara. Traktor wawancara adalah wawancara yang perlu ditujukan untuk menggunakan pedoman wawancara yang ditujukan. Kedua, wawancara semi-struktural adalah mereka yang telah dihadapkan pada pertanyaan berdasarkan wawancara pedoman, tetapi memiliki sifat fleksibel atau dapat dibungkus sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan. Jenis wawancara ketiga yang tidak memiliki struktur adalah bebas wawancara yang hanya menggerakkan mulutnya sebagai tanggapan atas pertanyaan.

Para penulis menggunakan teknik wawancara semi-struktur, di mana para peneliti telah menentukan pertanyaan dengan kuesioner wawancara, tetapi peneliti kemudian mendefinisikan kembali pertanyaan sesuai dengan temuan dan kesepakatan Informan. Penulis menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data ini karena memungkinkan penulis untuk berkomunikasi diam-diam dengan subjek yang terkait dengan penelitian ini. Data yang dihasilkan dari hasil wawancara lebih akurat karena berasal dari sumber.

Tabel 1

Data Responden

No	Nama	Jabatan
1	Deni Diyana	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya
2	Iwan Setiawan	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah
3	Mugi Anwari	Penggerak Lingkungan Hidup

4	Asep	Penggerak Lingkungan Hidup
5	Agus mulya	Masyarakat sekitar TPAS
6	Iis holis	Masyarakat sekitar TPAS
7	Zezen Saepul	Masyarakat sekitar TPAS
8	Atang Woldi	Masyarakat sekitar TPAS
9	Indra Ipul	Masyarakat sekitar TPAS
10	Epul Saep	Masyarakat sekitar TPAS

2. Observasi Menurut (Sarwono, 2006) Observasi adalah proses membuat catatan dan observasi sistematis pada objek atau subjek penelitian. Pencatatan sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang diteliti, serta aspek lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang sedang berlangsung, adalah hasil utama dari studi observasi. Dalam penelitian ini, para pengamat menggunakan pengamatan untuk mengumpulkan data yang tidak diperoleh sepanjang proses wawancara. Dengan melakukan observasi peneliti, data-data sebagai set data diperoleh.
3. Dokumentasi Menurut Herdiansyah (Herdiansyah, 2010) Dokumentasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data dari subyek sudut pandang melalui materi tertulis dan dokumen lain yang secara diam-diam untuk mendapatkan gambaran langsung oleh subjek yang bersangkutan. Peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data untuk membuat data berkualitas tinggi untuk melengkapi data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara.

Dokumentasi juga berfungsi sebagai bukti bahwa peneliti melakukan penelitian pribadi di lokasi menggunakan pengamatan dan wawancara.

5) Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disebut analisis kualitatif; yaitu, penelitian ini hanya bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan perubahan dalam bentuk titik data kalimat yang sistematis serta berbagai jenis titik data yang merugikan proses mengatasi hambatan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data dapat dilakukan dalam beberapa tahapan:

1. Pegolahan Data

Pengolahan data adalah langkah pertama dalam teknik analisis data. Tahap data *mining* adalah ketika data telah mencapai titik saturasi. Tujuan dari data *mining* adalah untuk menyesuaikan data dengan temuan penelitian sehingga titik data tidak bertentangan. Ada tiga tahap dalam analisis data: penyuntingan, pengkodean dan tabulasi.

- a. Penyuntingan (*Editing*), Tahap pertama dari pengolahan data ialah penyuntingan. Langkah paling dasar dalam memasukkan atau mengedit data adalah meninjau atau mengatur data sesuai dengan pedoman untuk pertanyaan penelitian.
- b. Pengkodean (*Coding*), Tahap kedua pengolahan data ialah coding atau pengkodean, yaitu yaitu, langkah kedua setelah meninjau atau menganalisis data. Pada titik ini, data ditandai dengan simbol atau teks yang akan digunakan sebagai basis analisis.

- c. Tabulasi (*Tabulating*), Tahap ketiga pengolahan data ialah tabulasi atau *tabulating*. Tahap tabulasi ini merupakan adalah langkah yang mengharuskan peneliti untuk mengkonfirmasi atau menganalisis data tersebut sesuai dengan temuan studi mereka.

2. Penganalisisan Data

Langkah kedua dalam analisa data adalah analisis data. Tahap analisis data adalah tahapan kedua setelah data yang dikumpulkan selama penelitian telah dikumpul, dianalisis, dan diatur secara sistematis. Tujuan dari analisis data adalah untuk meningkatkan, mengklasifikasikan, dan memfasilitasi transkripsi data.

3. Penafsiran Hasil Analisis

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penafsiran. Tujuan dari analisis temuan penelitian ini adalah untuk membuat data yang telah dianalisis, disesuaikan, dan disimpulkan menjadi kelompok yang dapat dipahami oleh pembaca. Salah satu cara untuk menerapkan simpulan dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan hipotesis.